

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Anggaran Rp 4 Miliar untuk Sistem Peringatan Dini Banjir

## Pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, DKI memiliki aplikasi yang dinamakan Pantau Banjir.

### Suseno

suseno@tempo.co.id

**JAKARTA** – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta tahun ini berencana menambah enam alat peringatan dini banjir atau *disaster warning system* (DWS) di enam kelurahan. Adapun anggaran yang disiapkan untuk pengadaan DWS di enam lokasi itu sebesar Rp 4,03 miliar. “Sesuai dengan harga yang ada di *e-budgeting* Pemprov DKI,” ujar Kepala Pusat Data dan Komunikasi BPBD Jakarta, Muhammad Insyaf, kemarin.

Insyaf mengatakan DWS itu berupa pengeras suara. Setiap DWS terdiri atas empat pengeras suara yang dipasang di satu tiang mengarah ke empat mata penjurang. Jarak antartiang diatur sekitar 500 meter. Masing-masing DWS akan terkoneksi dengan sistem peringatan dini banjir. Saat tinggi muka air mencapai siaga II, sirene otomatis berbunyi sebagai tanda peringatan. “Ini berbunyi saat pintu air siaga II, bersamaan dengan peringatan dini yang dikirimkan *SMS blast* dan grup WhatsApp kelurahan-kelurahan,” ujar dia.

Menurut Insyaf, pemerintah DKI sebelumnya telah memiliki DWS yang dipasang di 14 titik rawan banjir. Semua alat itu dapat berfungsi dengan baik sehingga masyarakat dapat bersiaga sebelum banjir datang. BPBD tengah mempertimbangkan untuk memfungsikan pelantang-masjid dalam sistem peringatan dini banjir. “Akan jadi masukan dan bahan evaluasi kami,” kata dia. “Menurut saya, memang bisa efektif juga pelantang-pelantang-masjid selain dari cara-cara yang sudah BPBD tempuh.”

Gubernur Anies Baswedan sebelumnya mengatakan pemerintah sebelumnya menyampaikan peringatan dini tentang ancaman banjir melalui media sosial. Namun cara ini dinilai kurang efektif karena tidak semua penduduk dapat mengakses informasi tersebut. “Malam hari diberitahunya lewat *hape* (telepon genggam). Akhirnya, sebagian tidak dapat informasi,” kata dia.

Atas dasar itu, dia menyampaikan rencana untuk memberikan peringatan lewat pengeras suara. “Nanti langsung ke masyarakat berkeliling menggunakan pelan-

tang untuk memberi tahu semuanya,” ujar dia.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, mendukung rencana pemerintah DKI untuk menambah pelantang dalam sistem peringatan dini bencana. “Pada prinsipnya bagus (menambah pelantang),” kata Suhaimi. “Teknisnya, Pemprov silakan supaya masyarakat lebih *aware*.”

Anggota Fraksi PKS itu mengatakan penggunaan pelantang akan menjadi pelengkap sistem peringatan dini. Sebab, pemerintah saat ini sudah memiliki sistem informasi digital melalui media sosial. Dengan adanya pelantang, informasi itu semakin mudah disebar. Sebab, masyarakat dapat mendengar langsung peringatan yang disampaikan pemerintah, tanpa harus melihat media sosial atau saluran informasi digital lain. “Masyarakat jadi lebih cepat tahu. Kalau dipadukan (antara digital dan manual) akan bagus untuk masyarakat,” ujar dia.

Anggota DPRD dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, justru mengkritik penggunaan pelantang dalam sistem peringatan

dini banjir. “Saya melihat sistem ini mirip seperti yang digunakan pada era Perang Dunia II,” kata dia. “Seharusnya Jakarta bisa memiliki sistem peringatan yang lebih modern.”

Menurut William, pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, DKI pernah memiliki aplikasi yang dinamakan Pantau Banjir. Aplikasi yang diluncurkan pada 20 Februari 2017 itu memiliki fitur “Siaga Banjir” yang dapat memberikan informasi soal ketinggian air sungai dan mengirimkan peringatan dini kepada pengguna. Namun sayangnya fitur ini justru tidak ada lagi pada versi 3.2.8 hasil *update* 13 Januari 2020. “Aplikasi berbasis Internet gawai seharusnya lebih efektif dan lebih murah ketimbang memasang pengeras suara,” kata William.

Kritik juga datang dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsano. Menurut dia, dengan APBD yang mencapai Rp 87,94 triliun, semestinya DKI bisa membeli perangkat yang lebih canggih. Ia menilai anggaran Rp 4,03 miliar terlalu tanggung jika hanya digunakan untuk sistem pengeras suara di enam lokasi. “Kalau saya



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Anggaran Rp 4 Miliar untuk Sistem Peringatan Dini Banjir

sih malah justru jangan pakai pelantang, tapi kentongan sekalian,” ucap dia. “Kalau kentongan kan cuma Rp 100 ribu.”

Gembong menyarankan agar pemerintah DKI menggandeng Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk membangun teknologi peringatan dini yang canggih dan akurat. Dengan begitu, masyarakat bisa mengantisipasi potensi bencana dengan segera. “Jangan kembali ke zaman batu,” kata dia.

Anggota staf riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Gurnadi Ridwan, menilai pengadaan enam set perangkat DWS senilai Rp 4,03 miliar terlalu mahal. Apalagi anggaran itu belum termasuk biaya perawatan yang diperkirakan tidak murah. “Anggaran Rp 4 miliar ini bisa digunakan untuk kegiatan fisik yang bisa langsung mengatasi atau meminimalkan banjir,” ucap dia.

● TAUFIQ SIDDIQ | IMAM HAMDI | M. JULNIS FIRMANSYAH | LANI DIANA

## Disaster Warning System

PEMERINTAH DKI Jakarta selama setahun terakhir telah mengoperasikan *disaster warning system* (DWS) di 14 lokasi rawan banjir. Untuk 14 DWS ini, pemerintah menyiapkan anggaran pemeliharaan sebesar Rp 165 juta.

Berikut ini 14 titik DWS yang sudah dioperasikan:

Rencana penambahan di enam DWS baru:

### Jakarta Selatan

- » Ulujami
- » Petogogan
- » Cipulir
- » Pengadegan
- » Cilandak Timur
- » Pejaten Timur

### Jakarta Selatan

- » Bukit Duri
- » Kebon Baru

### Jakarta Barat

- » Kendang Kali Angke
- » Cengkareng Barat

### Jakarta Barat

- » Rawa Buaya
- » Kapuk
- » Kembangan Utara

### Jakarta Timur

- » Rawa Terate

### Jakarta Utara

- » Marunda

### Jakarta Timur

- » Kampung Melayu
- » Bidara Cina
- » Cawang
- » Cipinang Melayu
- » Kebon Pala

### Anggaran

Nilai total anggaran yang disiapkan untuk pengadaan enam DWS sebesar Rp 4,03 miliar. Masing-masing DWS dilengkapi empat pengeras suara dan terkoneksi dengan sistem peringatan dini banjir. Saat tinggi muka air mencapai siaga II, sirene secara otomatis berbunyi sebagai tanda peringatan.

- » Enam stasiun ekspansi peringatan dini bencana transmisi Vhf radio Rp 3,1 miliar
- » Enam set *pole* DWS Rp 353 juta
- » Enam set modifikasi peranti lunak *elementary* dan *warning console* dengan *amplifier* 100W Rp 416 juta
- » Enam set *coaxial arrester* DWS Rp 14 juta
- » Enam set *horn speaker* 30 W Rp 7 juta
- » Enam set *storage battery* 20 Ah, 24V Rp 70 juta
- » Enam set elemen antena Rp 90 juta

SUMBER: APBD.DKI.GO.ID